

PERKEMBANGAN MADRASAH DI KOTA BANJARMASIN (SEBUAH TINJAUAN HISTORIS DARI TAHUN 2010-2014)

Ahdi Makmur, Imran Sarman, Radiansyah

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasari, Banjarmasin

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan madrasah di Kota Banjarmasin dari tahun 2010–2014, yang diringkas dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Ada 15 buah madrasah yang dikaji, tersebar pada empat kecamatan, yang bervariasi jenjang (MI, MTs, MA), status (Negeri dan Swasta), organisasi pembinaanya (NU dan Muhammadiyah), dan keberadaan lokasinya (satu atap dan tersendiri). Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumenter. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan madrasah di kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Perkembangan SDM, sarana dan prasarana madrasah masih kurang stabil. Walaupun kelulusan UAN siswanya telah mencapai 100 %, tetapi nilai rata-ratanya belum mendekati nilai kelulusan maksimal. Perkembangan guru dan tenaga kependidikan secara kuantitas agak mengalami stagnasi, tetapi secara kualitas cukup membanggakan. Mayoritas gurunya adalah lulusan S1 dan S2, kecuali pada madrasah swasta di mana masih terdapat guru lulusan SLTA dan Diploma.

Kata kunci: madrasah, perkembangan, SDM, sarana dan prasarana

A. Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, pembaharuan Islam telah memasuki wilayah Nusantara. Ketidak-puasan para tokoh Islam dan organisasi Islam mendorong munculnya pembaharuan tersebut. Faktor pendorong lainnya, menurut Steenbrink (1986), adalah perkembangan pendidikan Islam di negeri ini. Karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berperan penting dalam kehadiran dan perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia, tetapi juga penting untuk transformasi ilmu dan nilai, sehingga manusia Indonesia bisa menjadi berpengetahuan (Agama Islam), yang pada gilirannya berguna buat dirinya dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan bagi masyarakat melalui dakwah Islam yang disampaikan oleh para ulama, guru-guru agama, pendakwah dan lainnya yang pernah menimba ilmu di lembaga pendidikan Islam, khususnya di lembaga pendidikan formal dan non-formal.

Pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya adalah kelanjutan dari pendidikan Islam awal dalam bentuk khalaqah-khalaqah pembelajaran al-Qur'an, pengajian agama di mesjid, di surau dan di rumah para ulama. Selain dari pada itu, pendidikan Islam juga mengadopsi sistem lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang terdapat di Nusantara,

seperti *pesantren* di Jawa, *surau* di Sumatera Barat, *dayah* dan *muenasah* di Aceh (Ashrohah, 2000). Seiring perjalanan waktu, sistem pendidikan Islam dengan model tradisional ini kemudian berkembang setelah para pelajar-pelajar Nusantara kembali dari Timur Tengah, Saudi Arabia dan Mesir khususnya. Beberapa lembaga pendidikan Islam tradisional yang pertama kali tersentuh pembaharuan Islam adalah Sekolah Adabiyah di Padang Panjang (Sumatera Barat), Pendidikan Islam di Majalengka (Jawa Barat) dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta (lihat Steenbrink, 1986).

Sejak Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) berdiri di Indonesia pada tahun 1955, pendidikan agama menjadi salah satu tupoksi kementerian tersebut. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) bertanggung jawab mengelola berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab kementerian ini adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di bawah binaannya, baik yang berstatus swasta maupun yang berstatus negeri. Maka kemudian, didirikanlah berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam modern, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di negeri ini, seperti MWB, MI, MTs, MA, MAK, MAAN, PGA, SGHI, STAIN, IAIN, UIN. Pendirian lembaga-lembaga pendidikan formal ini pada dasarnya adalah untuk merespon tantangan zaman, sehingga lembaga pendidikan Islam juga bisa maju sebagaimana lembaga pendidikan umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu atau kualitas dan sekaligus menyelaraskan pendidikan agama dengan pendidikan umum. SKB 3 Menteri, UUP No. 20 Tahun 2000 tentang Kewajiban Belajar 9 Tahun, dan yang terakhir memasukan lembaga Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana terdapat dalam UUD No. 20 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional sejatinya merupakan upaya pemerintah termasuk Kementerian Agama untuk menyelaraskan kualitas pendidikan Islam dengan pendidikan umum atau sekolah-sekolah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan Nasional, yang sekarang berada di bawah tupoksi Kemendikdasmen dan Kemenristekdikti. Meskipun sekarang kesetaraan ini sudah diperoleh, tetapi hanya sebatas (tingkat) kelembagaan, sehingga alumni MI, MTs, MA bisa melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang

dikelola oleh Kemenbuddikdasmen dan Kemenristekdikti atau sebaliknya tamatan sekolah umum bisa melanjutkan ke sekolah/madrasah binaan Kemenag. Secara kuantitas dan kualitas, pendidikan Islam termasuk madrasah masih tertinggal dibanding lembaga pendidikan umum (lihat Azra, 2001; Muhaimin, 2013).

Namun demikian, berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Islam tahun 2010/2011, Direktorat Kependidikan Islam Kementerian Agama RI, di Indonesia terdapat 44.979 buah madrasah, yang terdiri dari MI sebanyak 23.071 buah, MTs sebanyak 15.244 buah, dan MA berjumlah 6.664 buah, tetapi dari jumlah tersebut hanya 3.882 buah yang berstatus negeri. Sisanya 41.089 madrasah masih berstatus swasta. Juga pada tahun yang sama, dari jumlah 23.071 MI yang terakreditasi baru 74, 67 % (MIN = 90,51 %, MIS = 73,31 %), dari MTs 15,244 buah, yang terakreditasi baru 68,47 % (MTsN = 93,25 %, MTsS = 65,87 %), dan dari 6.664 MA yang terakreditasi baru 67,36 % (MAN = 96,97 %, MAS = 63,44 %). Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, berdasarkan data yang sama terdapat 755 buah madrasah (MI = 415, MTs = 235, MA = 95 buah) pada tahun 2011; akan tetapi, jumlah madrasah swasta lebih banyak ketimbang madrasah negeri (MIS = 272 : MIN = 143, MTsS = 165 : MTsN = 80, MAS = 54 : MAN = 41 buah). Dengan demikian, perkembangan kualitas madrasah menjadi tidak signifikan. Begitupun di Kota Banjarmasin, selama waktu lima tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2010 sampai 2014, perkembangan lembaga pendidikan Islam tampaknya juga masih lambat atau bahkan statis. Secara kuantitatif, jumlah lembaga, guru, siswa, sarana dan prasarana bisa diketahui, tetapi perkembangannya dari kurun waktu ke kurun waktu tertentu tampaknya belum banyak dibicarakan, padahal pemberdayaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di kota seribu sungai ini harus selalu didorong dan diapresiasi. Pemikiran inilah yang juga mendorong para penulis untuk mengetahui lebih jelas tentang perkembangan madrasah di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Untuk itu, kami memilih dan mengangkat judul “Perkembangan Madrasah di Kota Banjarmasin (Sebuah Tinjauan Historis dari Tahun 2010-2014)”.

B. Madrasah: Pengertian, Komponen, Peranan dan Fungsinya

1. Pengertian Madrasah

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, yang berarti tempat belajar. Dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam* (1961) sebagaimana dikutip oleh Daulay (2009), disebutkan bahwa madrasah adalah nama dari suatu lembaga pendidikan di mana ilmu-ilmu keislaman diajarkan. “*The name of an institution where the Islamic sciences are studied.*” Definisi lain sebagaimana tertera dalam PP No. 28 dan 29 Tahun 1990 disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam (Daulay, 2009: 112). Dengan demikian, madrasah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang berfungsi untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman.

Madrasah adalah juga lembaga pendidikan Islam formal, yang terdapat di berbagai dunia Islam. Secara historis, madrasah merupakan kelanjutan dari bentuk lembaga pendidikan Islam awal, seperti *maktab/kuttub*, *halaqah*, *majlis*, pendidikan di mesjid atau surau, *khan*, dan pengajian-pengajian non-formal di rumah para ulama, dan lebih khusus kelanjutan dari lembaga pendidikan mesjid. Madrasah terbentuk pada tahapan ketiga dari aktivitas pendidikan mesjid, yaitu dari pendidikan mesjid ke mesjid *khan* dan berikutnya ke pendidikan dalam bentuk madrasah (Asrohah, 2000: 99).

Di Indonesia, madrasah berdiri pada awal abad ke-20 setelah masuknya gagasan-gagasan pembaruan dalam Islam. Ide-ide pembaruan yang umumnya dibawa oleh ulama-ulama Indonesia sepulang mereka dari belajar di Timur Tengah (Saudi Arabia dan Mesir) berdampak cukup signifikan terhadap gerakan pembaruan pendidikan Islam di tanah air (Steenbrink, 1986: 42-83).

Pendidikan madrasah di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai model dan penjenjangan. Ada model tradisional, yang hanya mengajarkan mata-mata pelajaran agama seperti Madrasah Diniyah, ada juga model kombinasi dengan menambahkan beberapa mata pelajaran umum dalam kegiatan pembelajarannya seperti Madrasah Wajib Belajar (MWB), dan model pendidikan modern yang porsi pembelajaran agama dan umum sebanding atau pelajaran umumnya lebih banyak tetapi tetap mempertahankan ciri kemadrasahannya, seperti madrasah binaan Kementrian Agama RI pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975. Madrasah binaan ini bermuatan 70 % pelajaran umum berbanding dengan 30% mata pelajaran agama. Madrasah tersebut juga berjenjang, yaitu dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga

Madrasah Aliyah (MA), yang masing-masing lama belajarnya 6 tahun, 3 tahun dan 3 tahun (Daulay, 2009: 97-105).

2. Komponen Pendidikan Madrasah

Sebagaimana halnya pendidikan sekolah atau pendidikan umum, madrasah juga memiliki unsur-unsur atau komponen pendidikan. Madrasah memiliki visi, misi dan tujuan. Ia juga memiliki kurikulum, baik kurikulum nasional, maupun kurikulum lokal atau kurikulum sendiri. Selain kurikulum, madrasah menawarkan berbagai mata pelajaran/materi yang dituangkan dalam silabus. Juga ada guru, murid, sarana dan prasarana lainnya untuk menopang pembelajaran di madrasah. Karena bentuknya formal, maka sistem penilaian atau evaluasi pembelajaran juga ada dan dilaksanakan, sehingga kompetensi murid atau siswa madrasah bisa diukur.

Ciri khas pendidikan Islam yang disebut madrasah memang berbeda dengan pesantren. Manajemen madrasah dipimpin oleh kepala madrasah yang dibantu oleh wakil dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu kepala urusan (Kaur) dan staf TU. Murid madrasah umumnya tidak tinggal di asrama, sehingga keberadaan tempat ibadah yang besar seperti mesjid tidak selalu ada. Kegiatan keagamaan biasanya dilaksanakan di aula atau mushalla. Oleh karena itu, madrasah tidak harus memiliki kyai, asrama atau mesjid seperti pasantren.

3. Peranan dan Fungsi Madrasah

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa peranan adalah manifestasi dari fungsi (seseorang, kelompok, lembaga). Bila seseorang, kelompok atau lembaga menjalankan fungsinya, maka dia atau mereka telah berperanan dalam kehidupan di mana ia atau mereka tinggal atau berada.

Peranan bisa juga dilihat dari perspektif sosiologis dengan pendekatan struktural-fungsional. Madrasah dimaknai sebagai sebuah struktur dalam sistem kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah struktur, madrasah mempunyai kedudukan atau posisi, dan mempunyai peranan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi (baik fungsi yang tampak /*manifest* maupun fungsi tersembunyi / *latent*) yang dijalankan oleh warganya dalam kehidupan sosial di mana madrasah itu berada. Karena itu, madrasah bisa memainkan peranannya sebagai pelaku/agen pembangunan dan perubahan sosial.

Fungsi utama daripada madrasah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Oleh karena itu, peranan madrasah adalah sebagai wadah/sarana belajar. Tentu saja, peranan madrasah tidak hanya berbasis intelektual, tetapi juga berdimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, madrasah bisa berperanan sebagai sarana politik, seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad (Iraq) pada abad ke 11 M (lihat Ahdi Makmur, 2002: 4-10; juga Azra, 2012: 67-71), sarana ekonomi (sebagai penjual jasa), dan sarana sosial budaya (sebagai wadah berinteraksi dan pelestarian tradisi atau budaya sekolah).

C. Konsep dan Teori Perkembangan

Kajian terhadap madrasah bisa dilihat dari perspektif perkembangannya. Untuk memahami dengan baik dimensi tersebut dibutuhkan teori yang relevan. Salah satunya adalah teori perkembangan.

Kajian tentang madrasah mau tidak mau harus dipahami secara teoritik. Teori tentang perkembangan menjadi keniscayaan dalam kajian yang penulis lakukan. Kuntowijoyo (1995: 4) menyebutkan bahwa untuk melihat suatu perkembangan (dalam proses sejarah) bisa digunakan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan melihat kesinambungan dan sekaligus perubahan yang terjadi (*Continuity and Change*). Proses perkembangan sesuatu terjadi melalui tahapan-tahapan dengan mengedepankan ciri-ciri yang menonjol dari sesuatu tersebut.

Dengan demikian, perkembangan lembaga pendidikan Islam atau madrasah bisa dikaji berdasarkan ciri-ciri khas madrasah, misalnya sarana dan prasarana, guru, murid sebagai perangkat kerasnya, kurikulum dan strategi pembelajaran sebagai perangkat lunak.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis kajian atau penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Pendekatan kuantitatif -biasa juga disebut pendekatan positivistik- digunakan karena datanya adalah kualitatif yang dikuantitatifkan (data kualitas dan perubahan sosial) dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Pendekatan kualitatif –biasa juga disebut

pendekatan naturalistik- digunakan karena objek kajian ini merupakan realitas yang berubah-ubah meskipun datanya kuantitatif (perkembangan madrasah selama 5 tahun) yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif, termasuk data hasil penelitian dari wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara *face to face* dengan kepala, wakil kepala, TU dan guru madrasah. Dengan demikian, kajian lapangan yang telah dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif ini mencoba mengukur dan menggambarkan realitas sosial secara natural sekaligus menjelaskan makna dibalik realitas sosial tersebut.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh madrasah yang ada di kota Banjarmasin (sebanyak 103 buah). Karena pertimbangan waktu dan kesibukan, maka diambil 15 madrasah. Kelimabelas madrasah tersebut dipilih secara *purposive sampling*, dan dianggap cukup representatif karena jumlah sampelnya sekitar 15 %, sebarannya ada di empat kecamatan (Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Barat), jenjangnya juga bervariasi (MI, MTs, MA), tidak terkecuali statusnya (Negeri, Swasta), organisasi atau yayasannya (NU, Muhammadiyah), dan keberadaan lokasinya (satu atap/komplek, tersendiri). Dengan demikian, yang dijadikan subjek kajian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan guru pada madrasah tersebut. Di samping itu, juga terdapat sejumlah informan. Mereka adalah TU madrasah dan beberapa pegawai dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

3. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan, pertama data primer atau data pokok dan kedua data sekunder. Data pokok yang digali atau dikumpulkan adalah data tentang perkembangan madrasah yang terdiri dari perkembangan SDM dan sarana-prasarana.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakamad, dan guru. Sumber data lainnya adalah orang-orang yang dipastikan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yaitu TU madrasah, dan

karyawan pada kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin selain bahan-bahan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengumpulan data sebagaimana disebutkan pada tulisan sebelumnya, penulis menggunakan empat jenis teknik atau metode, yaitu kuestioner, wawancara, observasi dan dokumenter.

(1) Angket (*Questionnaire*)

Teknik ini merupakan salah satu teknik atau metode pengumpulan data di lapangan (*field research*). Kuestioner dibuat dalam bentuk tertutup (*closed questionnaire*) dengan item-item pertanyaan yang sudah baku, yaitu sebagian dari instrumen akreditasi sekolah/madrasah. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data pokok tentang perkembangan madrasah di kota Banjarmasin sejak tahun 2010-2014.

(2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik kedua yang digunakan dalam pengumpulan data. Karena sebahagian datanya adalah kualitatif, maka kami melakukan wawancara secara *face to face* dengan pimpinan dan guru madrasah melalui instrumen wawancara tidak terstruktur. Menurut Cole (1972), wawancara, terutama *in-depth interview* adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penyelidikan kualitatif, yang datanya tidak diubah ke dalam angka-angka atau data kuantitatif.

(3) Pengamatan (*Observation*)

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data (pokok dan sekunder). Penulis mengunjungi beberapa madrasah sambil mengamatinya dan membangun sebuah hubungan baik (*rapport*) dengan warga madrasah tersebut. Bagaimanapun, teknik ini penting digunakan jika seseorang penyelidik hanya sedikit mengetahui tentang keadaan sasaran penelitian atau gejala sosial (Cole, 1972: 163).

(4) Dokumenter

Teknik ini juga digunakan dalam pengumpulan data sekunder, terutama data yang berhubungan dengan angka-angka atau data kuantitatif, seperti laporan-laporan

statistik dan monografis. Data seperti ini penting untuk menggambarkan perkembangan madrasah di kota Banjarmasin dari kurun waktu 2010 - 2014, kondisi geografi dan demografi, tidak terkecuali subjek penelitian.

Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian mengolah data tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu *editing*, *categorizing*, *coding*, *scoring*, *tabulating* dan *interpreting*. Untuk menafsirkan data perkembangan madrasah, penulis menggunakan 5 (lima) katagori sebagai berikut:

1. 0 - <20 % = sangat rendah/sangat kecil
2. 20 - <40 % = rendah/kecil
3. 40 - <60 % = sedang/cukup
4. 60 - <80 % = tinggi/besar
5. 80 - 100 % = sangat tinggi/sangat besar.

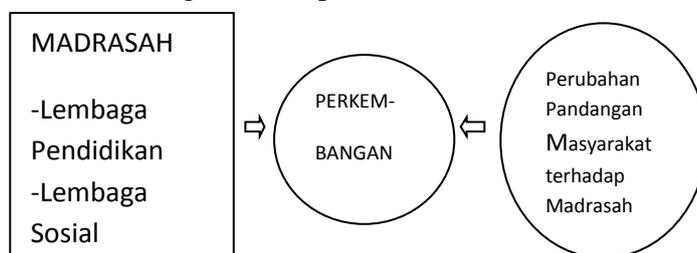
Data yang sudah terkumpul dan diolah, selanjutnay dianalisis. Menurut Sugiono (2009), analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistimatis data yang telah diperoleh dari hasil beberapa teknik pengumpulan data (kuestioner, wawancara, pengamatan, dan dokumen) dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan penggabungan, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, analisis data adalah suatu pekerjaan yang cukup sulit, sehingga peneliti harus bekerja keras, kreatif, memiliki daya dan kemampuan pemahaman atau kecerdasan yang tinggi.

Sebagaimana disebutkan dalam tulisan sebelumnya, bahwa analisis data kuantitatif atau kualitatif yang dikuantitatifkan dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu perhitungan prosentasi, skor rata-rata, dan grafik. Dari hasil perhitungan prosentasi, penulis kemudian mengetahui perkembangan madrasah di kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kerangka Konseptual Penelitian

Desain atau kerangka konseptual kajian ini bisa dipahami sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini.

Skema 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Dari Skema 1. di atas dapat diketahui bahwa madrasah tidak saja berstatus sebagai lembaga atau institusi pendidikan tetapi juga sebagai institusi sosial, yang kemudian berkembang mengikuti waktu. Karena berkembang, madrasah bisa direspon cukup atau lebih positif (dari yang sebelumnya negatif) oleh masyarakat sebagai stickholder maupun pengguna madrasah.

E. Perkembangan Madrasah

Perkembangan madrasah di kota Banjarmasin dapat dilihat dari perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari perkembangan jumlah siswa, guru dan tenaga kependidikan, perkembangan sarana dan prasarana madrasah. Perkembangan jumlah siswa di beberapa madrasah di kota Banjarmasin dari tahun 2010-2014 telah mengalami ketidakstabilan.

Perkembangan jumlah siswa di tiga madrasah swasta kadang-kadang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, ada yang kondisinya tetap atau tidak berubah, tetapi ada juga yang mengalami penurunan. Dari jumlah siswa sebanyak 118 orang pada tahun 2010 di MI Darul Istiqamah naik menjadi 137 orang pada tahun 2014, dari 103 orang siswa pada tahun yang sama turun menjadi 100 orang di MTs Nurul Islam. Tetapi ada juga yang jumlah siswanya menurun drastis seperti yang terjadi di MA Siti Maryam, yaitu dari 194 orang pada tahun 2010 menjadi 98 orang pada tahun 2014.

Sebaliknya, perkembangan jumlah siswa pada madrasah negeri pada umumnya agak stabil. Dari tiga madrasah negeri yang diteliti, sebuah dari madrasah negeri tersebut telah mengalami perkembangan jumlah siswanya yang terus menaik dari tahun ke tahun, yaitu di MTsN Banjar Selatan. Di MAN 2 Model, meskipun telah mengalami

penurunan jumlah siswanya pada tahun 2014, tetapi jumlahnya tetap lebih banyak dibanding jumlah siswanya pada tahun 2010. Dari jumlah siswa sebanyak 769 pada tahun 2010 naik menjadi 948 orang pada tahun 2014. Berbeda dengan perkembangan pada dua madrasah negeri di atas, jumlah siswa pada MIN Pemurus telah mengalami penurunan sampai tahun 2012, tetapi kemudian naik kembali seperti tahun 2010 dan terus meningkat pada tahun 2014 meski tidak signifikan. Dengan demikian, perkembangan jumlah siswa pada madrasah swasta umumnya menurun dibanding perkembangan jumlah siswa pada madrasah yang berstatus negeri.

Begitu juga jumlah siswa yang baru masuk madrasah, perkembangannya masih lambat. Dari jumlah siswa baru sebanyak 25 orang di sebuah MI swasta pada tahun 2010 hanya bertambah 2 orang atau naik menjadi 27 orang pada tahun 2014, dari 44 orang pada tahun 2010 hanya naik menjadi 51 orang pada sebuah MI negeri. Di MTs kondisinya juga tidak berbeda, yaitu dari 30 orang siswa baru pada tahun 2010 di sebuah MTs swasta hanya naik menjadi 35 orang pada tahun 2014, dari jumlah 144 orang siswa baru di sebuah MTsN naik menjadi 158 pada tahun 2014. Jumlah siswa baru di MA negeri juga berkembang tetapi hanya untuk beberapa tahun, selanjutnya menurun, yaitu dari jumlah siswa barunya sebanyak 282 pada tahun 2010 naik menjadi 373 orang (2011), 354 orang (2012), 328 orang (2013) dan turun kembali menjadi 277 orang pada tahun 2014. Juga terdapat jumlah siswa baru madrasah yang tidak berkembang dari tahun ke tahun karena jumlahnya semakin menurun. Dari jumlah 60 siswa barunya pada tahun 2010 di sebuah MA swasta turun menjadi 39 orang pada tahun 2014. Bahkan menurut kepala MA Muhammadiyah, Ibu Dra. Patmawati, siswa baru pada tahun pelajaran 2014/2015 di MA yang dipimpinnya hanya 20 orang, yang terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan untuk dua jurusan atau peminatan (PIS dan PMIA).

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar (4 buah madrasah) dari enam madrasah swasta dan negeri di kota Banjarmasin dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) telah mengalami perkembangan atau peningkatan dalam jumlah siswa baru yang memasuki lembaga pendidikan mereka, tetapi juga tidak signifikan karena secara kuantitas mengalami kenaikan yang tidak stabil.

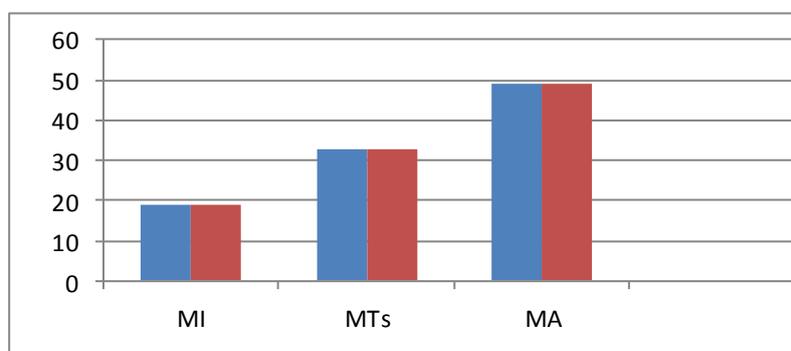
Sebenarnya, keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah cukup tinggi. Berbagai kendala menyebabkan madrasah belum bisa mengakomodir

keinginan mereka semua. Menurut Kepala MIN Kebun Bunga, Drs. Kamal dan Kepala MAN 1 Banjarmasin, Drs. H. Abdurrahman, M.Pd., madrasah yang mereka pimpin tidak bisa menampung semua calon siswa baru karena lokal belajar yang tersedia tidak cukup. Pada MIN Kebun Bunga hanya ada 9 ruang belajar, pada MAN 1 hanya ada 23 ruang belajar yang tersedia hingga tahun pembelajaran 2014/2015 sekarang ini. Pada MTsN Kelayan, ruang belajarnya juga tidak banyak (12 buah), sehingga hanya bisa menampung tiga kelas untuk siswa barunya karena sudah ada 9 rombongan belajar (disingkat rombel) dari kelas VIII dan Kelas IX.

Ketidakstabilan perkembangan jumlah siswa dan jumlah siswa baru pada beberapa madrasah di kota Banjarmasin ternyata juga terjadi pada perkembangan nilai kelulusan siswa pada madrasah, baik pada MI, MTs maupun pada MA. Perkembangan nilai kelulusan UAN siswa madrasah di kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir ini (2010-2014) juga tidak stabil atau telah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Selain dari pada itu, nilai kelulusan UAN siswa madrasah juga belum mendekati nilai maksimal UAN (SD/MI = 30, SMP/MTs = 40, SMA/MA = 50). Nilai rerata tertinggi yang diperoleh siswa MI secara kumulatif adalah 19,56 (2011), nilai rata-rata tertinggi siswa MTs adalah 31,62 (2013), dan nilai rerata tertinggi siswa MA adalah 48,27 (2011). Dengan demikian, nilai rerata kelulusan UAN siswa MA telah mendekati nilai maksimal. Perkembangan ini bisa dilihat pada Grafik 1. di bawah ini.

Grafik 1. Perkembangan Kelulusan UAN Siswa Madrasah di Kota Banjarmasin Tahun 2010-2014



Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi kelulusan UAN siswa MI adalah 19,56. Nilai rata-rata tertinggi siswa MTs adalah 31,62, dan nilai rerata tertinggi siswa MA adalah 48,27.

Bagaimanapun, perkembangan ketiga aspek tersebut (jumlah siswa, jumlah siswa baru dan nilai kelulusan UAN siswa) telah mengindikasikan bahwa perkembangan jumlah siswa, jumlah siswa baru dan nilai kelulusan UAN siswa pada tiga jenjang pendidikan/madrasah di kota Banjarmasin per-tahunnya telah mengalami fluktuasi, naik, turun, atau tetap tanpa mengalami perubahan yang signifikan.

Begitupun perkembangan jumlah guru pada madrasah di kota Banjarmasin secara kuantitas selama 5 tahun terakhir ini telah berjalan lambat. Perkembangan jumlah guru atau pendidik pada madrasah swasta di kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir ini (2010-2014) selalu berubah-ubah. Sebaliknya, perkembangan guru atau pendidik di tiga madrasah negeri di kota ini dalam kurun waktu yang sama secara kuantitas tidak banyak mengalami perubahan karena mayoritas adalah PNS. Akan tetapi, secara kualitas pendidikan guru madrasah di kota Banjarmasin sekarang ini sangat baik. Mayoritas guru atau tenaga pendidik pada 15 madrasah yang diteliti telah memenuhi standar persyaratan sebagai tenaga pendidik, yaitu berpendidikan S1 untuk semua jenjang pendidikan madrasah (MI, MTs, MA). Bahkan di antara mereka ada yang berlatar belakang pendidikan S2 (10 orang di MTsN Mulawarman, 6 orang di MTsN Banjar Selatan, 3 orang di MTsN Kelayan, 8 orang guru di MAN 2, 7 orang guru di MAN 1, 2 orang di MAN 3, 5 orang di MA Siti Maryam dan 4 orang guru di MA Muhammadiyah).

Meskipun demikian, guru yang berpendidikan Diploma dan SLTA masih dijumpai pada beberapa madrasah di kota ini (1 orang lulusan SLTA di MI Darul Istiqamah, 1 orang tamatan SLTA di MIN Kebun Bunga, 1 orang berpendidikan SLTA di MTs Nurul Islam, 1 orang berpendidikan Diploma di MIN Pemurus, 2 orang berpendidikan Diploma di MI al-Qalam, 1 orang lulusan Diploma di MTsN Mulawarman dan 2 orang berpendidikan Diploma di MA Siti Maryam). Berdasarkan prosentasi juga diketahui bahwa 11,63 % guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) berpendidikan SLTA, 3,49 % berpendidikan Diploma, 84,88 % berpendidikan S1. Dengan demikian, mayoritas guru MI di kota Banjarmasin berpendidikan S1 (84,88 %).

Begitu juga, guru MTs, 1,88 % adalah berpendidikan SLTA, 0,62 % berpendidikan Diploma, 85,62 % berpendidikan S1, dan 11,88 % lulusan S2. Dengan demikian, mayoritas (97,50 %) guru MTs di kota ini berpendidikan S1 ke atas. Sedangkan guru MA, masing-masing 1,55 % adalah berpendidikan SLTA dan Diploma, 83,43 % adalah lulusan berpendidikan S1 dan 13,47 % lulusan S2. Dengan demikian, mayoritas (96,90 %) guru MA di kota ini juga berpendidikan S1 ke atas.

Di samping itu, perkembangan jumlah tenaga kependidikan pada madrasah di kota ini juga masih tidak stabil. Perkembangan jumlah tenaga kependidikan pada 3 madrasah swasta di kota Banjarmasin tidak berubah selama tiga tahun berturut-turut (2010, 2011 dan 2012), tetapi kemudian menurun menjadi 7 orang pada dua tahun terakhir (2013 dan 2014). Sebaliknya, perkembangan jumlah tenaga kependidikan pada 3 madrasah negeri di kota Banjarmasin juga tidak stabil, yaitu dari 11 orang di tahun 2010 naik menjadi 14 orang pada tahun 2011, tetapi kemudian turun menjadi 13 orang pada tiga tahun berturut-turut (2012, 2013 dan 2014).

Begitu juga dengan perkembangan sarana dan prasarana madrasah di kota ini hampir tidak ada perubahan atau kenaikan selama 5 tahun terakhir. Luas lahan/tanah tiga madrasah swasta di kota Banjarmasin sampai tahun 2014 tidak mengalami perkembangan yang berarti. Perkembangan lahan pada MI swasta naik dari 200 m² pada tahun 2010 menjadi 940 m² pada tahun 2014; pada MTs swasta tidak mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai 2014, yaitu jumlah lahannya tetap seluas 3.538 m²; pada MA swasta juga tetap, yaitu seluas 4.800 m² dari tahun 2010 sampai 2014. Sebaliknya, jumlah luas bangunannya telah berkembang. Pada MI yang sama, jumlah luas bangunannya bertambah dari 120 m² pada tahun 2010 menjadi 162 m² pada tahun 2014; dari 500 m² naik menjadi 626 m² pada tahun 2014 pada MTs; kecuali pada MA yang jumlah luas bangunannya tidak berubah dari tahun 2010-2014, yaitu seluas 2.200 m². Dengan demikian, perkembangan luas lahan dan bangunan pada MA swasta yang diteliti adalah stagnan atau tidak mengalami perubahan seperti halnya yang terjadi pada tiga madrasah negeri di kota ini.

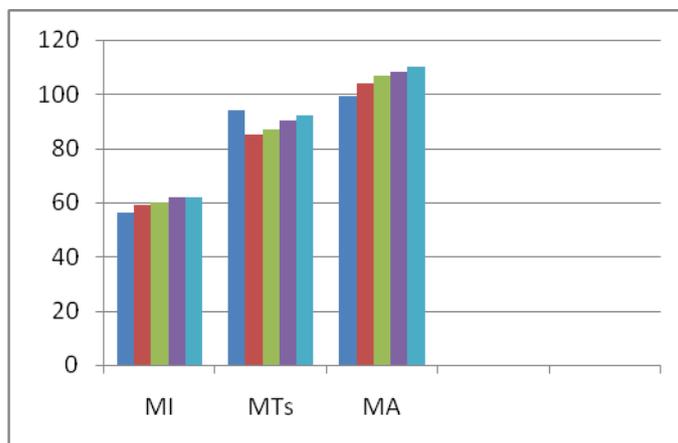
Namun demikian, jumlah lahan/tanah dan bangunan madrasah negeri lebih luas daripada jumlah lahan dan bangunan madrasah swasta. Luas lahan madrasah negeri > 11.000 m²; luas bangunannya > 6.000 m², sedangkan jumlah luas tanah madrasah swasta hanya sekitar 9.000 m² dan luas bangunannya hanyalah sekitar 1.000 m² jika luas

bangunan dari tiga madrasah swasta itu dijumlahkan. Akan tetapi, luas lahan dan bangunan pada madrasah negeri tidak berkembang. Pada madrasah swasta meski lebih sempit, luas lahan/tanah dan luas bangunannya agak berkembang selama lima tahun terakhir ini (2010-2014), meski tidak signifikan.

Sebagaimana dipaparkan dalam tulisan sebelumnya bahwa luas lahan madrasah di kota Banjarmasin tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan ada yang stagnan. *Pertama*, tanahnya milik yayasan atau organisasi di mana di atasnya berdiri beberapa lembaga pendidikan satu atap, seperti MTs Nurul Islam, MA Siti Maryam, dan MA Muhammadiyah. *Kedua*, tanah atau lahannya terletak di lingkungan yang padat penduduk, di mana sebelah kiri dan kanannya, muka dan belakangnya dibatasi oleh banyak bangunan rumah masyarakat urban seperti MIN Kebun Bunga, MTsN Kelayan dan MTsN Pekauman. Bagaimanapun, keluasan dan keterbatas lahan berdampak terhadap pembangunan gedung, kantor, ruang belajar dan berbagai ruang kegiatan lainnya di madrasah.

Pada tulisan berikut, penulis akan menyajikan data perkembangan jumlah kantor / ruang pimpinan, ruang guru, ruang belajar, dan ruang sarana pendukung pembelajaran lainnya pada madrasah di kota Banjarmasin sejak tahun 2010-2014. Jumlah sarana dan prasarana madrasah, terutama dilihat dari jumlah kantor pimpinan dan TU, ruang guru, ruang belajar dan keberadaan ruang laboratorium, ternyata telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. MI dan MA telah mengalami kenaikan setiap tahun secara kuantitas, sehingga pada tahun 2014 jumlahnya lebih banyak dari pada 3 tahun (MI) atau 4 tahun (MA) sebelumnya. Dari 56 buah berkembang menjadi 62 buah pada MI dan dari 99 buah berkembang menjadi 110 buah pada MA. Sebaliknya, MTs mengalami penurunan, yaitu dari 99 buah pada tahun 2010 turun menjadi 92 buah pada tahun 2014 seperti yang tergambar pada Grafik 2. pada halaman berikutnya.

Grafik 2. Perkembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Fasilitas Madrasah MI, MTs dan MA di Kota Banjarmasin Tahun 2010-2014



Grafik di atas menggambarkan kondisi sarana dan prasarana madrasah di kota Banjarmasin yang lambat perkembangannya. Bahkan di MTs terjadi penurunan jumlah sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran di madrasah. Obseravsi penulis secara langsung ke lapangan semakin memperkuat informasi tentang hal itu. Diperkirakan bahwa beberapa madrasah akan menemukan kesulitan atau bahkan ketidakmungkinan untuk berkembang dan melakukan penambahan bangunan, kantor, ruang belajar dan fasilitas pendukung lainnya, kecuali dibangun bertingkat dan dilakukan pembebasan lahan. Di samping lahannya terbatas (seperti MIN Kebun Bunga), juga berada dalam kompleks pendidikan satu atap (seperti MTs Nurul Islam, MA Siti Maryam dan MA Muhammadiyah).

Selanjutnya, penulis akan menyajikan data perkembangan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya seperti jumlah perpustakaan dan ruang baca, ruang keterampilan, ruang kesiswaan (UKS, PMR, OSIS, Pramuka), ruang kegiatan seni budaya, lembaga koperasi, kantin sekolah, lapangan olah raga, tempat ibadah, aula dan toilet. Kondisi perkembangan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, pengembangan kreativitas siswa, dan fasilitas pada tiga madrasah swasta dan tiga madrasah negeri di kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir ini. Dengan jumlah yang bervariasi pada setiap tahunnya, perkembangannya pada dua lembaga pendidikan yang berbeda status tersebut tidak mengalami kenaikan berarti. Secara kuantitas, jumlah sarana, prasana dan fasilitas pendukungnya hanya bertambah 5 buah untuk jangka waktu lima tahun pada madrasah swasta (dari 27 buah pada tahun 2010 naik menjadi 32 buah pada tahun

2014), dan 11 buah pada madrasah negeri (dari 77 buah pada tahun 2010 naik menjadi 88 pada tahun 2014).

F. Kesimpulan

Perkembangan madrasah di kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2010-2014, tidak stabil atau selalu berubah-ubah. Dilihat dari perkembangan SDM, sarana dan prasarana pada 15 buah madrasah yang diteliti, rata-rata belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Perkembangan jumlah siswa, jumlah siswa baru dan kelulusan mereka dalam UAN belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Meskipun keinginan masyarakat di kota ini untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah cukup tinggi, tetapi ruang belajar belum cukup untuk menampung seluruh calon siswa baru. Walaupun kelulusan siswa dalam UAN telah mencapai 100 %, tetapi nilai rata-ratanya belum mendekati nilai kelulusan maksimal. Begitu juga perkembangan guru dan tenaga kependidikan sangat lambat, secara kuantitas agak mengalami stagnasi, tetapi secara kualitas cukup membanggakan. Mereka rata-rata lulusan S1, dan bahkan S2, kecuali di madrasah swasta yang masih terdapat lulusan Diploma dan SLTA. Perkembangan sarana dan prasarana madrasah juga lamban. Luas lahan dan bangunan madrasah selama 5 tahun terakhir ini masih sangat kecil perubahannya. Keterbatasan lahan belum memungkinkan sejumlah madrasah memperluas bangunan dan menambah ruang belajarnya. Tentu saja, pada madrasah-madrasah yang berstatus negeri secara umum SDM dan sarana-prasarananya lebih menguntungkan. Artinya lebih banyak dan lebih lengkap, dibanding madrasah swasta yang sebagian besar dana operasionalnya sangat tergantung kepada iuran siswa dan bantuan finansial dari yayasan pemilik atau pengelolanya. Di samping luas lahannya yang terbatas, keuangan juga terbatas karena harus memperhatikan -jika tidak dikatakan mengutamakan- kesejahteraan pimpinan, guru dan stafnya, maka sebagian besar madrasah yang dikaji, terutama MI, belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti ketiadaan perpustakaan kecuali ruang baca, belum adanya lapangan khusus berolah raga, dan tempat ibadah, kecuali sebagian MTsN dan MAN. Namun demikian, MTs Swasta dan MA Swasta juga belum memiliki sarana dan prasarana selengkap madrasah yang berstatus negeri.

Dengan demikian, diharapkan kepada pimpinan madrasah untuk mencari mitra kerja yang lebih luas. Kehadiran berbagai stickholder memungkinkan terjadinya perkembangan madrasah yang semakin meningkat, SDM semakin profesional dan berkualitas, sarana-prasarana semakin lengkap, sehingga tata pengelolaan, pengadministrasian dan proses pembelajaran di madrasah akan lebih baik dari pada sebelumnya. Selain itu, juga diharapkan akan terjadi perubahan pandangan sebagian masyarakat terhadap keberadaan madrasah di negeri ini, sehingga madrasah tidak lagi dipandang oleh mereka dengan sebelah mata, termarjinalkan di negerinya sendiri, tetapi seyogyanya diakui sebagai lembaga pendidikan Islam yang ikut berkontribusi besar bagi masyarakat, bangsa dan negara, warga lokal, komunitas regional dan rakyat di negeri ini secara nasional. Dalam realitas, madrasah berkembang dan menjadi wadah alternatif menimba ilmu buat anak-anak bangasa di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Asrohah, Hanun, (1999), *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos).
- Azra, Azyumardi, (2012), *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (2013), *Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2011/2012*.
- Cole, Stephen, (1972), *The Sociological Method*, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company).
- Daulay, H. Haidar Putra, (2009), *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Kuntowijoyo, (1995), *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya).
- Makmur, Ahdi, "Nizamiyah: A Sunni Madrasah in Baghdad at Medieval Islam," *Fikrah*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2002), hal. 4-10.
- Mitchell, G. Duncan, ed. (1979), *A New Dictionary of Sociology*, (London: Routledge & Kegan Paul).
- Muhaimin, (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar).
- Shorter Encyclopaedia of Islam*, (1961), (Leiden: E.J. Brill).
- Soemardjan, Selo, (1990), *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Steenbrink, Karel A., (1986), *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES).
- Sujana, Nana dan Ibrahim, (2001), *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).

- Tilaar, H.A.R., (2012), *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Wajib Belajar, (Bandung : Citra Umbara, 2010).
- Vago, Steven, (2004), *Social Change*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall), Fifth Edition.
- Yusof, Rohana, (2006), *Asas Sains Sosial dari Perspektif Sosiologi*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka).